

Sumbangan Konsep Otentisitas Martin Heidegger bagi Praksis Dialog Interreligius: Upaya Mendukung Moderasi Beragama di Indonesia

Kristoforus Juliano Ilham*, F.X. Eko Armada Riyanto
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia
*kristoforusjulianoilham@gmail.com

Abstract

Martin Heidegger's concept of authenticity, which is the focus of this article, has made a significant contribution to the practice of interreligious dialogue and religious moderation in Indonesia. The reason is because this concept offers authentic humans in every religion in Indonesia. An authentic human being is identified as a person who is able to see himself as a whole, is able to take responsibility for his existence, and is able to understand himself as a human being who truly lives in the world without being dominated and determined by other people. The aim to be achieved in this research is to form and develop authentic religious subjects in every religion in Indonesia. By using a qualitative descriptive method in the form of reviewing various scientific sources that are in accordance with this discourse, this paper succeeded in finding that Martin Heidegger's concept of Authenticity is important to instill in every religion in Indonesia in forming and developing religious subjects who take part in dialogic interreligious dialogue and support moderation. religion in Indonesia. The novelty of this article is that Martin Heidegger's concept of Authenticity is relevant to religious life in Indonesia, both in the practice of interreligious dialogue and in supporting religious moderation in Indonesia.

Keywords: *Concept of Authenticity; Authentic Human; Interreligious Dialogue; Religious Moderation*

Abstrak

Konsep *Otentisitas* Martin Heidegger yang menjadi fokus tulisan ini memiliki sumbangan yang cukup besar bagi praksis dialog interreligius dan moderasi beragama di Indonesia. Alasannya adalah karena konsep ini menawarkan manusia yang otentik di dalam setiap agama di Indonesia. Manusia yang otentik diidentikkan sebagai pribadi yang mampu memandang diri secara utuh, mampu mempertanggungjawabkan keberadaan diri, dan mampu memahami diri sebagai manusia yang sungguh hidup di dunia tanpa didominasi dan dideterminasi oleh orang lain. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membentuk dan membina subjek beragama yang otentik dalam setiap agama yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa penelaahan berbagai sumber ilmiah yang sesuai dengan diskursus ini, tulisan ini berhasil menemukan bahwa konsep *Otentisitas* Martin Heidegger penting untuk ditanamkan dalam setiap agama di Indonesia dalam membentuk dan membina subjek beragama yang mengambil bagian dalam dialog interreligius yang dialogis dan mendukung moderasi beragama di Indonesia. Kebaruan tulisan ini adalah bahwa konsep *Otentisitas* Martin Heidegger ternyata relevan bagi kehidupan beragama di Indonesia, baik dalam praksis dialog interreligius maupun dalam mendukung moderasi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: *Konsep Otentisitas; Manusia Otentik; Dialog Interreligius; Moderasi Beragama*

Pendahuluan

Diskursus seputar radikalisme agama di Indonesia selalu menjadi sebuah tema yang hangat untuk direfleksikan. Radikalisme agama adalah sebuah masalah yang mengganggu stabilitas kehidupan bersama dan selalu memiliki konsekuensi buruk bagi integrasi bangsa. Tatkala integrasi bangsa dimaknai sebagai upaya menggalang persatuan atas dasar kebhinekaan yang melekat dalam tubuh Indonesia, radikalisme agama hadir bagai parasit bagi tumbuh suburnya integrasi itu. Sebabnya terletak pada praktik radikalisme agama itu sendiri berdampak pada degradasi nilai-nilai kebangsaan melalui tindakan kekerasan dan aksi ekstrim yang mengatasnamakan nilai-nilai agama tertentu (Juergensmeyer, 2002). Radikalisme agama mencoba mengganti nilai-nilai bersama yang telah mapan dengan nilai-nilai agama yang mempresentasikan kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang radikalisme agama tersebut dapat dimengerti sebagai upaya mengganti kemapanan nilai-nilai bersama seperti persatuan, gotong royong, toleransi, dan/atau musyawarah dengan nilai-nilai agama tertentu yang sama sekali baru dalam realitas kehidupan bangsa. Nilai-nilai baru itu bisa saja berupa ideologi agama berupa islamisme, terorisme, dan paham-paham baru lainnya. Dengan kata lain, radikalisme agama pada dirinya sendiri merupakan sebuah paham yang menginginkan lahirnya perubahan terhadap status Quo yang sedang dijalankan dalam sebuah bangsa (Faozan, 2022). Radikalisme yang mengatasnamakan agama berusaha menggapai apa yang menjadi cita-cita dari kepentingan tertentu, serentak mengokohkan cita-cita itu dengan cara mengeliminasi nilai-nilai yang sebelumnya menjadi buah kesepakatan bersama.

Sebenarnya alasan mendasar mengapa isu mengenai radikalisme dikaitkan dengan agama adalah karena gerakan-gerakan radikal yang sedang aktual pada saat ini mengidentikkan dirinya dengan agama tertentu. Selain itu apabila melihat konflik-konflik besar dewasa ini yang memakan korban banyak, besar kemungkinan selalu berkaitan dengan kelompok-kelompok radikal yang mengidentikkan dirinya dengan agama tertentu (Musyafak & Nisa, 2020). Stigmatisasi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa pada agama tertentu muncul kelompok dan golongan tertentu yang mengklaim ajarannya sebagai yang mutlak benar, sehingga aplikasi terhadap ajaran itu kadangkala bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan pada satu sisi dan menjauh dari inti ajaran agama yang sesungguhnya pada sisi yang lain.

Di Indonesia, sejarah mencatat beberapa tindakan radikalisme agama yang terjadi. Pada tahun 1950-an, sebuah kelompok bernama Darul Islam (DI) memakai syariat Islam untuk mendirikan negara Islam di Indonesia (Afadal dkk, 2005). Mereka menginginkan adanya penerapan ajaran Islam yang menyeluruh di Indonesia. Ada juga kelompok Laskar Jihad dan Jemaah Islamiyah (JI) yang bergerak antara awal tahun 2000-an. Laskar Jihad muncul sebagai tanggapan terhadap konflik agama di Maluku dan Poso yang bertujuan untuk membela Muslim di wilayah tersebut, sedangkan Jemaah Islamiyah dikenal sebagai organisasi teroris yang terkait dengan al-Qaida. Terakhir radikalisme agama juga marak dilakukan oleh kelompok yang mengusung ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (Asrori, 2015).

Pemerintah Indonesia tidak pernah tinggal diam menyikapi gerakan radikalisme. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah dalam meredam berbagai pergolakan yang terjadi di berbagai daerah. Keberhasilan pemerintah juga terbukti dengan berdirinya forum diskusi agama-agama di Indonesia yang dilakukan dalam upaya menguatkan sikap inklusif agama-agama yang ada. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari UU radikalisme hingga pada pengarahannya sistem pendidikan yang menguatkan jiwa nasionalis-patriotis telah memberikan pengaruh signifikan bagi

pengecahan radikalisme itu. Pada era pemerintahan Joko Widodo, salah satu terobosan yang dihasilkan adalah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proyek kenegaraan yang mampu menjembatani perbedaan keagamaan, menghormati hak asasi manusia, dan membangun masyarakat yang inklusif dan damai di bumi Indonesia.

Moderasi beragama dicanangkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 lalu sebagai respon terhadap gerakan radikalisme, intoleransi, politik identitas dan beragam isu disintegrasi lainnya yang berkembang di Indonesia (Kementrian Agama RI, 2019). Lahirnya moderasi beragama bertujuan merangkul masyarakat Indonesia untuk membangun sikap inklusif terhadap satu sama lain. Penekanan utama tujuan ini terletak pada sikap dan cara beragama setiap masyarakat Indonesia yang mesti mengutamakan harmonisasi dalam menyikapi realitas keanekaragaman Indonesia. Moderasi beragama menghendaki setiap pemeluk agama untuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi sesama teladan aturan hidup keagamaan (Suharto, 2021). Cara beragama dalam sudut pandang moderasi beragama memberikan peluang bagi terciptanya sikap saling menghormati, pengakuan, keterbukaan, dan toleran terhadap satu sama lain.

Pada saat yang bersamaan, proyek moderasi beragama yang telah digalangkan oleh pemerintah juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan yang dimiliki adalah pertama moderasi beragama menjadi sebuah proyek yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai kepada masyarakat akar rumput. Kedua, masih ada tindakan intoleransi, diskriminatif, dan radikal yang mengatasnamakan agama muncul di kalangan masyarakat, misalnya pengeboman masjid, gereja ataupun tempat ibadah lainnya yang berakar dari ketidakterjangkauan moderasi tadi. Ketiga moderasi agama belum cukup optimal masuk dalam sistem pendidikan yang nasionalis, karena hampir pasti bahwa pendidikan agama di Indonesia masih dikungkungi sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis (Munif dkk, 2023).

Beberapa kelemahan menyangkut moderasi beragama menunjukkan belum optimalnya praktik moderasi beragama di Indonesia. Hal yang disoroti secara khusus adalah mengenai ketidakterjangkauan proyek moderasi beragama sampai ke lapisan masyarakat akar rumput, termasuk masyarakat yang termarjinalkan dalam banyak aspek. Yang dimaksud sebagai masyarakat termarjinalkan adalah kelompok yang menjadi korban ketidaksetaraan akses pendidikan, kesulitan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga begitu rentan mengalami indoktrinasi. Kelompok ini menjadi bagian dari keseluruhan masyarakat yang akrab dengan dinamika dialog iman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mudah diindoktrinasi karena latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang kurang memadai. Ketidaksetaraan yang dialami dalam berbagai aspek menjadi celah bagi ajaran-ajaran dari kelompok radikal tertentu untuk mempengaruhi dan memanipulasi individu dalam kelompok ini.

Indoktrinasi terjadi ketika kelompok radikal tertentu menawarkan alternatif ekstrim agar kelompok masyarakat yang termarjinalkan keluar dari situasi ketidaksetaraan. Alternatif tersebut memakai ajaran agama dan cara berpikir tertentu yang dipercaya bisa mengeluarkan masyarakat dari kondisi ketertindasan dan keterbelakangan. Melalui cara ini, pemberi indoktrinasi bisa membentuk opini korbannya agar menyanggupi kebutuhan dan kepentingan yang bersangkutan. Kepentingan itu beragam, mulai dari mempertahankan agama (sering juga disebut membela agama) dan menyebarkan ajaran agama tertentu. Praktik ekstrem seperti terorisme tidak jarang juga dihalalkan dalam mencapai kepentingan-kepentingan tersebut.

Imbas yang muncul kemudian adalah terciptanya penguatan ikatan primordial berdasarkan agama yang diperlihatkan oleh sebuah kelompok masyarakat atau pemeluk agama. Indoktrinasi mengukuhkan sikap yang mencerminkan kebersamaan dan solidaritas sebagai bagian dari kelompok tertentu, tetapi kemudian bergeser ke dalam

bentuk radikalisme dan militanisme tatkala berhadapan dengan kelompok yang berbeda. Indoktrinasi semacam ini cenderung mengajarkan nilai-nilai atau keyakinan baru tentang agama tanpa memberikan ruang kepada individu untuk melakukan pertimbangan kritis atau evaluasi independen atas pengaruh yang diberikan dari luar. Model indoktrinasi seperti ini mudah saja masuk ke dalam kelompok lapisan bawah yang notabene menjadi korban ketidaksetaraan akses pendidikan, kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan berbagai akses penting lainnya.

Tentu saja, indoktrinasi terhadap lapisan masyarakat bawah menjadi salah satu penyebab mandeknya dialog interreligius di Indonesia. Masyarakat menjadi sangat intoleran, terpolarisasi, hidup dalam konflik, serta menjadi skeptis terhadap keanekaragaman. Dampak indoktrinasi menimbulkan masyarakat untuk bersikap eksklusif terhadap ajaran agamanya, sehingga menutup peluang bagi terciptanya dialog antara agama. Dialog antara agama memungkinkan terbangunnya kesalingpahaman antara mereka yang berbeda keyakinan, kemudian membangun kesadaran yang benar di dalam kehidupan bersama. Melalui dialog antara agama ini, segala perbedaan yang ada tidak lagi menjadi halangan untuk menjadikan kehidupan bersama lebih harmonis, inklusif, dan toleran.

Tantangan dialog antar agama di Indonesia menjadi begitu kompleks. Pada satu sisi, dialog antara agama kesulitan berhadapan dengan masyarakat yang telah diindoktrinasi oleh kelompok radikal yang meyakini ajaran agama mereka sebagai kebenaran fundamental. Pada sisi yang lain, dialog antara agama tidak lagi mendapat tanggapan yang positif karena apabila terlalu bersikap inklusif, akhirnya masyarakat kehilangan identitas sebagai pemeluk suatu agama (Halim, 2015). Tantangan ini lebih juga berdampak luas pada moderasi beragama di Indonesia, mengingat dialog interreligius merupakan salah satu instrumen penting dari tegaknya moderasi beragama di Indonesia. Ketika dialog interreligius tersendat, demikian moderasi beragama di Indonesia pun tersendat karena tidak ditemukannya peluang untuk bisa menjembatani diskursus seputar keyakinan masing-masing.

Menindaklanjuti fenomena problematis di atas, salah satu jalan menerapkan dialog interreligius yang sehat adalah dengan mendukung bertumbuh dan berkembangnya makhluk beragama (manusia) yang otentik di Indonesia. Manusia sebagai pribadi yang otentik ini dikenal sebagai konsep Otentisitas, sebuah gagasan Martin Heidegger yang menjelaskan manusia sebagai makhluk yang mampu menemukan dirinya secara otentik tanpa adanya paksaan dari luar melalui tahapan refleksi yang dilewatinya di dalam kehidupan (Alrafi & Mendrofa, 2017). Manusia bisa mengenal dirinya secara lebih baik, sesuatu yang mendukungnya membuat keputusan atas berbagai pilihan hidup. Konsep otentisitas Martin Heidegger ini menekankan independensi manusia yang identik dengan kebebasan di dalam diri untuk menentukan arah hidup, sikap, dan pandangan yang otonom. Konsep Otentisitas Martin Heidegger ini relevan dengan gerakan radikalisme agama di Indonesia yang gencar dilakukan lewat jalur indoktrinasi. Sorotan utama dalam indoktrinasi adalah pribadi manusia yang dipengaruhi dan dimanipulasi untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu. Konsep Otentisitas Heidegger hadir sebagai tawaran bagaimana manusia sebagai makhluk beragama seharusnya bertindak menyikapi gejala indoktrinasi itu. Manusia mesti memiliki independensi dalam menyikapi isu radikalisme umumnya dan indoktrinasi khususnya. Konsep Otentisitas Martin Heidegger ini diharapkan menjadi satu sumbangan besar bagi kemajuan praksis dialog interreligius dan mesti mendukung moderasi beragama di Indonesia karena persisnya moderasi beragama mesti didukung oleh pribadi-pribadi beragama yang merasa betah dengan ajaran agama sendiri tanpa campur tangan pihak lain, bersikap inklusif terhadap keanekaragaman, dan mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan beragama.

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan studi kepustakaan. Sebagai sebuah studi kepustakaan, pembahasan dalam kajian ini bersumber pada penelaahan berbagai sumber ilmiah yang sesuai dengan diskursus konsep *Otentisitas* Martin Heidegger. Sumber-sumber kepustakaan ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari buku dan skripsi yang telah menganalisis sistem serupa. Sementara itu, sumber sekunder dari studi kepustakaan berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pendekatan yang sama, secara khusus mengenai konsep *Otentisitas* Martin Heidegger, dialog interreligius, dan moderasi beragama di Indonesia.

Berdasarkan metodologi dan pendekatan di atas, tulisan ini pertama-tama memaparkan praksis dialog interreligius yang terjadi di Indonesia. Hal ini kemudian diikuti oleh bagian lain, yakni menyangkut tindakan radikalisme sebagai tantangan dialog interreligius di Indonesia. Poin penting lainnya adalah mengungkapkan kekayaan konsep manusia yang otentik dalam terjemahan *Otentisitas* Martin Heidegger sebagai sumbangan besar terhadap praksis dialog interreligius di Indonesia. Terakhir, memaparkan pembentukan dan pembinaan subjek beragama yang otentik sebagai upaya mendukung moderasi beragama di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Memahami Praksis Dialog Interreligius di Indonesia

Dialog interreligius di Indonesia selalu memiliki kaitan mendasar dengan isu sosio-politik (Riyanto, 2010). Sudut pandang ini hendak menegaskan bahwa dialog interreligius terjadi dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan membutuhkan keterlibatan aktif semua orang. Dialog interreligius tidak semata merupakan diskursus para elit agama, tetapi menyentuh seluruh lapisan agama di dalam realitas yang dialami. Di dalamnya terjadi pertukaran gagasan yang konstruktif antara pemeluk agama dan mengikutsertakan keaktifan masing-masing pemeluk agama untuk keluar dari sekat-sekat perbedaan yang ada. Dengan demikian, dialog interreligius ini dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan yang selalu mendarat dalam kehidupan sehari-hari dan masuk sebagai bagian dari kehidupan itu.

Menurut Armada Riyanto, dialog interreligius yang terjadi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Dalam bentangan periode ini, ada tiga gagasan besar yang menjadi proyek besar dialog interreligius di Indonesia. *Pertama* proyek “Perserikatan Agama-Agama” sebagai gagasan yang diadopsi oleh H. Mukti dari U. Thant, seorang sekretaris jenderal PBB saat itu. Di Indonesia, terobosan gagasan ini termanifestasi ke dalam organisasi *Badan Kerjasama Antarumat Beragama* yang terbukti mendasarkan diri pada prinsip keadilan, perdamaian, dan lingkungan hidup yang mendukung kehidupan. *Kedua* munculnya Dialog Antar Iman (DIAN). Dialog iman ini merupakan jembatan dialog yang membuka diri terhadap pengertian iman. Mekanismenya adalah seseorang membuka diri terhadap iman yang lain tanpa mengkhianati imannya sendiri, dan memperkaya pengalaman iman lewat jalur dialog. *Ketiga* menyangkut cara beragama (Islam) yang baru. Konsep beragama yang baru ini dilakukan dengan menaruh ketaatan kepada Tuhan, sekaligus memiliki pendekatan kemanusiaan (Riyanto, 2010).

Armada Riyanto juga membagi dialog interreligius Indonesia ke dalam delapan tema penting. Tema-tema ini merupakan hasil pergumulannya terhadap praksis dialog interreligius yang berjalan dalam kajian sejarah Indonesia selama ini. Bisa jadi, tema-tema ini juga menjadi gambaran umum terhadap dialog interreligius di Indonesia yang ditempa lewat berbagai peristiwa, ideologi, konstitusi, dan kultur masyarakat sendiri. Tema yang pertama menyangkut hak beragama. Konstitusi negara Indonesia menjamin setiap orang

untuk memeluk agama, baik itu Islam, Katolik, Hindu, Budha dan lain-lain. Hak ini bermuara dari kultur bangsa Indonesia sendiri, yakni kultur kebebasan yang melekat dalam diri setiap pribadi untuk menjalankan hak dan kewajiban hukum agama. Dialog interreligius menjamin bahwa negara tidak diperkenankan mengintervensi urusan agama, karena apabila demikian halnya dapat dikritisi bahwa negara sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol agama. Agama-agama ada di dalam negara Indonesia, tetapi itu bukan berarti bahwa Indonesia menjadi negara agama.

Kedua agama dalam civil society. Hidup beragama, termasuk praksis dialog interreligius dalam societias (masyarakat) adalah bagian dari penghormatan dan pengakuan terhadap kehadiran sesama di sekitar. Hal ini misalnya merujuk pada cara pandang dan sikap seorang terhadap yang lain, sekaligus menyangkut kehidupan beragama orang lain. Ada beberapa persoalan runyam di Indonesia yang sekaligus bertalian dengan poin ini, diantaranya adalah mengenai paradoks iman yang disinyalir justru mengalienasi orang lain, dan tindakan kriminalitas yang membawa-bawa jubah agama. Pada poin inilah dialog dan rekonsiliasi menjadi alternatif yang perlu diaplikasikan demi terciptanya penghormatan kepada sesama.

Ketiga determinisme agama oleh negara dalam RUU-KUB. Regulasi yang dibuat pemerintah melalui RUU-KUB secara implisit hendak mempresentasikan upaya dominasi negara terhadap agama di Indonesia. Imbasnya RUU-KUB menjadi semacam pengontrol praktek kehidupan beragama di Indonesia, dan tentu saja RUU-KUB dinilai diskriminatif serta rancu terhadap prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia. *Keempat* agama tanpa kritik. Di sini kritik dimaksudkan sebagai aktivitas pembacaan ulang terhadap praktik kehidupan beragama yang dijalankan di Indonesia. Salah satu tujuan kritik ini adalah untuk semakin menemukan konteks kitab suci dalam situasi zaman, baik dari segi interpretasi maupun aplikasi ajaran agama di ruang publik.

Kelima memimpikan agama anti kekerasan. Tindakan anarkis yang dilakukan atas nama agama perlu menjadi perhatian bersama bahwa agama digunakan untuk melanggengkan praktik kekerasan di dalam hidup masyarakat. Perlu ada terobosan agama yang anti kekerasan, yang mengutamakan sikap keterbukaan dalam hal apa saja. Beriman yang sejati adalah cara hidup yang memberi ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan lewat cinta kasih, perdamaian dan lain-lain. Dengan kata lain, tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan untuk menguasai cara hidup beragama setiap orang. *Keenam*, tentang praksis dialogal Indonesia. Fokus poin ini adalah upaya mendekonstruksi Surat Keputusan Bersama Ahmadiyah (SKB-A) yang dinilai mendiskriminasi kelompok Ahmadiyah. Perlu diperhatikan bahwa beberapa kelompok masyarakat dan organisasi Islam menilai Ahmadiyah sebagai kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam, sementara kelompok hak asasi manusia dan sebagian masyarakat internasional menyuarakan keprihatinan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi terhadap komunitas Ahmadiyah.

Ketujuh konsep agama anti kekerasan menjadi fondasi dialog interreligius. Agama anti kekerasan mewajibkan setiap subjek beragama di Indonesia untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam membangun iman yang merangkul, menggagas persaudaraan yang sejati dan mengedepankan orientasi kemanusiaan. Membangun iman yang merangkul mengarahkan setiap subjek beriman agar mengedepankan model-model penghayatan iman yang mengutamakan sikap saling mengampuni dan meminta maaf. Dalam menggagas persaudaraan yang sejati, setiap subjek beriman Indonesia mestinya melihat sesamanya sebagai sesama yang terus hadir dalam setiap pengalaman hidup, kegembiraan, maupun harapan. Mengedepankan orientasi kemanusiaan dapat dipahami sebagai upaya membela sisi kemanusiaan dalam setiap praktik hidup beragama. Artinya, penghayatan hidup beragama tidak terlepas dari pendekatan kemanusiaan.

Kedelapan dialog interreligius dalam kacamata ideologis. Pembahasan poin ini berkaitan erat dengan isu syariat Islam di dalam Piagam Jakarta yang memiliki dampak perpecahan politis dalam hidup beragama di Indonesia. Secara historis, menyoal syariat Islam merupakan pergumulan bersama para pendiri bangsa, karena syariat Islam memiliki konsekuensi besar terhadap konstitusi negara. Konsekuensi pertama yang muncul adalah bahwa syariat Islam hanya menegaskan kewajiban satu agama saja, sementara agama lain tidak diperhitungkan. Persoalannya menjadi kompleks, mengingat syariat Islam tidak representatif terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia. Konsekuensi kedua muncul dalam konteks kehidupan beragama, di mana rumusan syariat Islam justru membuka keran terbentuknya pemerintahan yang diktator berdalil agama di negara Indonesia.

Penjelasan tersebut di atas mengafirmasi bahwa sebenarnya latar belakang dialog interreligius di Indonesia bersumber dari realitas keseharian masyarakat. Dialog interreligius ini merupakan bentuk pertemuan hati dan pikiran dari setiap pemeluk agama yang berupaya menghilangkan agresifitas diantara berbagai keyakinan. Berbagai peristiwa, ideologi, konstitusi, dan kultur masyarakat yang ada merupakan bagian tidak terpisahkan dari dialog yang menghubungkan realitas kehidupan keseharian masyarakat Indonesian ke dalam kesatuan kesepahaman akan hakikat keberagaman yang dimiliki. Sekarang konkretisasi dari hal ini secara jelas tampak di dalam praktik dialog interreligius yang dilakukan oleh lembaga seperti Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB), Badan Musyawarah Antar Umat Beragama, Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama, Dialog Antar Iman (DIAN) dan lain-lain (Kamal, 2019).

Meskipun demikian tidak dapat disangsikan juga bahwa pada kenyataannya dialog interreligius di Indonesia secara negatif dialami sebagai perdebatan tentang keyakinan. Dalam adu gagasannya dengan sesama yang berbeda keyakinan, seseorang tidak jarang mencoba untuk mencari kelemahan lawan dialognya dan melegitimasi keyakinannya sebagai satu-satunya yang mutlak benar. Dialog ini jelas merupakan paradoks dari tujuan dialog interreligius, yakni mencapai kesalingpahaman atas dasar kebebasan untuk menghormati satu sama lain. Ketimpangan dialog interreligius ini bersumber dari sikap eksklusif yang masih melekat dalam subjek beragama. Di dalamnya juga termaktub individualitas, merasa keyakinan sendiri sebagai satu-satunya kebenaran.

2. Indoktrinasi Sebagai Tantangan Dialog Interreligius di Indonesia

Sebelum membahas secara lebih mendalam dampak yang ditimbulkan indoktrinasi bagi dialog interreligius di Indonesia, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan indoktrinasi. Secara etimologis kata indoktrinasi berasal dari Bahasa Latin yaitu *indoctrinare*, yang berarti mengajarkan atau mendidik. Kata ini terbentuk dari gabungan kata *in* (ke dalam) dan *doctrina* (ajaran atau doktrin), yang diartikan sebagai proses memberikan ajaran atau doktrin kepada orang lain. Definisi ini secara positif dimaknai sebagai sebuah transfer pengetahuan atau ajaran, tetapi dalam perkembangannya kata indoktrinasi juga dipahami secara negatif sebagai upaya membentuk dan mengendalikan pemikiran orang lain dengan cara mengimpor keyakinan dan ajaran tanpa memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menimbang secara kritis.

Esensi term indoktrinasi terpaut pada hal mengendalikan pikiran. Proses ini berkesinambungan dengan *control beliefs*, yakni keyakinan alamiah yang diperoleh melalui proses kebudayaan, pendidikan, sosialisasi dan interaksi dengan sesama manusia dan alam. Mekanisme kerja indoktrinasi dalam *control beliefs* ini adalah dengan mengendalikan segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran seseorang sehingga mempengaruhi caranya memandang segala sesuatu di dalam kehidupan. Di dalam *control beliefs* ini indoktrinasi bekerja dengan memungkinkan seseorang untuk bisa menentukan diterima atau tidaknya keyakinan orang lain, serta pada saat yang bersamaan berfungsi

sebagai penyedia kondisi bagi seseorang untuk menerima keyakinan lain ketika seseorang itu bermaksud membangun sebuah konsep keyakinan (Desmaliza, 2012).

Dalam konteks agama di Indonesia, indoktrinasi dapat dijelaskan sebagai sebuah proses membentuk dan mengendalikan pemikiran orang lain dengan menggunakan dalih ajaran dan keyakinan agama. Konsep indoktrinasi agama ini dimainkan dengan cara memperkuat perasaan kekitaan sebagai bagian dari agama tertentu di Indonesia dalam upaya untuk menegaskan identitas. Kata-kata seperti Tuhan kita, ajaran kita, kitab suci kita, dan sejenisnya merupakan dalih yang dipakai dalam memperkuat perasaan kekitaan tersebut. Semakin seseorang merasa menjadi bagian integral dari sebuah kelompok agama, apalagi dicampur dengan fanatisme yang berlebihan, maka proses indoktrinasi itu semakin mudah dilakukan. Prinsip dasarnya terpusat pada usaha untuk mengkonsolidasi kedudukan agama dan melegitimasi dikotomi antara agama saya dengan agama anda, ajaran saya dengan ajaran anda, dan kitab suci saya dengan kitab suci anda.

Gerakan indoktrinasi, berorientasi pada usaha untuk mengendalikan orang lain secara keseluruhan. Doktrin yang ditransfer dimaksudkan agar korban mengadopsinya sebagai landasan berpikir dan bertindak sehari-hari. Kehidupan seorang yang menjadi korban indoktrinasi adalah kehidupan yang diharapkan berbasis doktrin tadi, yang memampukannya untuk menentukan diterima atau tidaknya keyakinan orang lain. Sebuah doktrin ekstrem tentu mengarahkan pelakunya untuk menjadikan doktrin tersebut sebagai *role model* yang harus dipertahankan, sehingga pelakunya harus selalu berwaspada terhadap gangguan dari luar. Indoktrinasi menjadi penyedia kondisi bagi seseorang untuk membangun sebuah konsep keyakinan yang kiranya mampu memasuki berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam bidang pendidikan, indoktrinasi menyebar secara terpadu melalui di sekolah dan institusi terkait, sedangkan dalam bidang politik partai politik menjadi wadah yang tepat untuk menumbuhkan semangat dan ajaran (Syam, 2008).

Tujuan lain dari indoktrinasi adalah untuk menciptakan cara berpikir berdasarkan ideologi ekstrem kepada orang lain. Kelompok atau aliran ekstrem mencoba untuk mengusung ideologi berasaskan keyakinan agama di dalam sebuah tatanan kehidupan yang sudah memiliki ideologi yang formal. Sebagai contoh, kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan mengusung ideologi khilafah sebagai ideologi negara Indonesia. Kelompok seperti ini memperjuangkan ideologi berbasis ajaran agama, dan serentak mengabaikan ideologi sah yang representatif di Indonesia. Fenomena ini juga sering disebut sebagai gerakan radikalisme dan fundamentalisme, tetapi tetap saja semuanya berawal indoktrinasi yang dijalankan oleh jaringan dan aliran terkait. Fokus indoktrinasi dalam gerakan radikalisme atau fundamentalisme adalah melakukan propaganda ideologi berbasis doktrin agama dan ajaran tertentu.

Perlu disadari juga bahwa sasaran indoktrinasi agama, seperti juga terjadi di Indonesia tidak lari jauh dari masyarakat yang menjadi korban ketidaksetaraan akses pendidikan, kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan beragam akses penting lainnya. Alasan mendasarnya adalah karena situasi kehidupan seperti ini membuka peluang bagi masuknya indoktrinasi. Indoktrinasi masuk dengan dua cara ideal berupa *justifikasi ideologi* melalui pengetahuan dan pengalaman pribadi, dan *cultural framing* melalui interpretasi teks kitab suci di dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari sudut pandang *justifikasi ideologi*, indoktrinasi masuk melalui pendekatan pribadi ke pribadi yang mungkin memiliki kedekatan secara primordial, misalnya agama. Adapun dari *cultural framing*, indoktrinasi dijalankan berdasarkan pendekatan interpretasi Kitab Suci yang digiring demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok.

Sampai pada titik ini, dapat dibenarkan bahwa indoktrinasi memiliki dampak yang buruk bagi dialog interreligius di Indonesia. Indoktrinasi telah berpotensi menciptakan

pengkotak-kotakan subjek beragama di Indonesia berdasarkan doktrin tertentu. Sebuah kelompok masyarakat yang menjadi korban indoktrinasi menjadi cenderung bersikap defensif terhadap sesama yang berbeda keyakinan, bahkan menjadi enggan untuk membuka diri terhadap keyakinan yang lain. Selain itu, indoktrinasi juga membuka kemungkinan sebuah kelompok menyembunyikan identitasnya dari pihak lain, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman baru terhadap keanekaragaman. Ketika sebuah kelompok masyarakat menutup diri terhadap perbincangan dengan yang lain, tidak mungkin harmonisasi bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama.

Pada dasarnya dialog interreligius adalah dialog yang memberikan pemahaman baru terhadap perbedaan keyakinan masing-masing (Tanzil, 2012). Indoktrinasi dengan sendirinya menutup diri terhadap adanya pemahaman baru di dalam dialog interreligius. Selain menimbulkan vakumnya komunikasi yang dialogis antara setiap pemeluk agama, indoktrinasi juga secara total membatasi horizon intelektual pada pandangan yang simplisitas dan biner menyangkut perbedaan ajaran dan keyakinan. Pandangan seperti ini sangat berpotensi menimbulkan konflik di antara masyarakat Indonesia, mengingat kelompok yang terindoktrinasi membatasi ruang diskusi antara agama-agama yang ada. Dialog interreligius menjadi tidak produktif terhadap sumbangsih pemikiran-pemikiran kreatif yang dipercaya mampu membangun relasi kehidupan beragama yang baik.

Persoalan utama yang ditimbulkan oleh gerakan indoktrinasi bagi dialog interreligius adalah manipulasi doktrin terhadap subjek atau individu beragama di Indonesia. Halnya menjadi parah karena pribadi yang telah diindoktrinasi menimbulkan ketidaksetaraan di dalam dialog. Seorang yang diindoktrinasi sulit untuk melihat kekayaan nilai pada keyakinan lain. Tidak ada kesetaraan di dalam dialog, baik pada tataran ide maupun praksis. Dialog yang membangun adalah dialog yang memiliki keselarasan di dalam ide dan praksis, tetapi penerimaan doktrin ekstrem dari aliran atau gerakan tertentu dapat menegasikan ide dan praksis ide di dalam dialog. Individu yang menjadi korban indoktrinasi juga akan dengan mudah memiliki persepsi buruk terhadap orang lain. Akibatnya dialog interreligius yang dibangun menjadi lahan subur berkembangnya stereotip dan prasangka, padahal dialog interreligius menginginkan adanya pandangan yang objektif terhadap individu dari agama lain.

3. Konsep *Otentisitas* Martin Heidegger

Autentik merupakan salah satu kata favorit Heidegger dalam membahasakan *Das Sein* (manusia). *Das Sein* dapat dipahami sebagai ruang di mana manusia mampu menemukan kebermaknaan diri (Martaufiq & Fachruddin, 2019). Menjelaskan manusia yang autentik dalam pandangan Heidegger dapat dimulai dari kualitas manusia sebagai makhluk yang hidup dalam temporalitas pemahaman. Menurut Heidegger, pemahaman merupakan kapasitas manusia yang secara primordial merupakan sesuatu yang eksistensial (Hardiman, 2003). Pemahaman yang melekat dalam setiap *Das Sein* merupakan bagian dari memahami cara berada manusia, sekaligus menunjukkan keterbukaan terhadap orang lain. Di dalam kehadirannya dengan orang lain, Heidegger menyatakan bahwa kehadiran manusia yang otentik bukan melulu soal keberadaan diri secara fisik di dalam sebuah tempat, tetapi lebih merupakan sikap menuntun diri terhadap masa depan yang baik.

Heidegger meyakini bahwa kesadaran akan kedirian adalah dasar bagi manusia untuk dapat menemukan dirinya yang otentik. *Otentisitas* dimaksudkan secara konkret sebagai upaya manusia untuk dapat menyadari Ada yang menjadi miliknya. Manusia adalah dia yang berusaha menemukan makna terdalam hidupnya yang tidak terlihat (Riyanto, 2011). Bagi Heidegger, kesadaran adalah pokok terpenting agar manusia dapat menemukan dirinya. Inilah yang dimaksud dengan *otentisitas*, yakni kondisi di mana manusia mampu mempertanggung jawabkan keberadaan dirinya dan memahami diri

sebagai manusia yang sungguh hidup di dunia. Kebalikannya adalah *inotentisitas*, sebuah situasi manakala manusia tidak menyadari keberadaan di dunia karena digenggam oleh kebiasaan, aturan, norma, dan/atau dogma tertentu (Wrathall, 2006).

Manusia yang otentik adalah manusia yang mampu memandang dirinya secara utuh. Pengenalan yang utuh ini menyangkut semua hal, mulai dari manusia pada dirinya sendiri maupun dalam relasi dengan dunia dan sesama yang pada intinya menegaskan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermakna (Tan, 2023). Pada dirinya sendiri, manusia yang otentik diikat oleh kesadaran akan keberadaan, adaptasi, kerja akal budi, dan prinsip-prinsip. Pada manusia juga melekat sisi relasionalitas terhadap dunia dan sesama. Dunia menjadi dimensi transendental yang mendukung keberadaan manusia. Adapun relasionalitas manusia juga berhubungan dengan relasi dengan sesama manusia, sehingga manusia disebut ada yang memanusiasi (Riyanto, 2013). Bagi manusia yang otentik, keberadaan sesama bersifat suportif bagi dirinya, tetapi bukan berarti bahwa sesama bisa mendominasi dan mendeterminasi hakikat keberadaannya di dunia.

Konsep *otentisitas* Heidegger selalu berkaitan dengan ada dari manusia di dalam dunia. Alasannya adalah karena di dunia manusia diberikan anjuran etis bagaimana menunjukkan cara berada (Kristiatmo, 2017). Dunia adalah dimensi di mana manusia keluar dari dirinya dan mengambil tempat untuk menunjukkan keberadaannya. Dalam bahasa Heidegger, dunia adalah “ada-adaan” dan “das sein” yang lain. Dunia dekat dengan manusia dan memberi ruang bagi manusia untuk menunjukkan keotentikan diri, dalam artian bahwa menjadikan manusia sebagai makhluk yang memandang dirinya secara utuh tanpa didominasi dan dideterminasi manusia lain, karena manusia selalu siap ada dalam segala situasinya di dunia (Azis, 2013). Namun dunia juga bisa menjadikan manusia menjadi tidak otentik apabila manusia terseret terlalu jauh ke dalam dunia. Manusia menjadi tidak otentik karena didominasi oleh dunia, dan pada akhirnya manusia tidak bereksistensi dengan sungguh-sungguh di dalam dunia (Tjahjadi, 2016).

Keberadaan manusia yang otentik di dalam dunia memiliki esensi untuk dapat melampaui dirinya sendiri. Dengan alasan demikian, manusia selalu berada di dalam proses untuk bisa melampaui diri. Bukan tidak mungkin usaha untuk melampaui diri sendiri ini dapat terwujud, pasalnya manusia selalu menyadari eksistensinya sebagai pribadi yang mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang harus dikejar. *Otentisitas* adalah cara paling kreatif untuk dapat mengungkapkan makna hidup manusia di dunia. Artinya, dengan mengungkap keberadaan diri di tengah dunia, manusia bisa menunjukkan bahwa dirinya memang sungguh ada di dalam realitas hidup. Dengan demikian kompleksitas hidup manusia dialami sebagai perjalanan yang membawa manusia pada makna terdalam hidup.

Konsep *otentisitas* Heidegger juga memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki keunikan. Dalam hal ini, manusia memiliki perbedaan dengan sesama di sekitar karena eksistensinya bersama yang lain merupakan kesempatan untuk dapat memaknai realitas hidup yang berbeda antara manusia dengan entitas-entitas lain (Riyanto, 2017). Kemampuan manusia untuk mendalami dirinya sendiri, baik berkaitan dengan keunikan maupun relasionalitas dirinya, dalam filsafat Heidegger seakan melukiskan bahwa manusia (*Das Sein*) sesungguhnya berani mengusik keseluruhan dirinya untuk menemukan makna kedirian. Hal ini berarti bahwa menjadikan pencarian yang dilakukan manusia dalam proses menjadi adalah kesadaran transenden yang diproyeksikan dengan intensionalitas menjadi otentik. Dengan demikian, keotentikan manusia menurut Heidegger dimaksudkan agar manusia dapat mengungkap bagaimana dunia ini menjadi kesempatan untuk hidup dan menemukan tujuan ontologis di dalam dirinya.

4. Sumbangan Konsep *Otentisitas* Martin Heidegger bagi Praksis Dialog Interreligius

Konsep *otentisitas* Heidegger bisa digunakan untuk membentuk subjek beragama yang otentik di Indonesia. Tujuannya secara khusus adalah untuk membentuk kesadaran akan kedirian subjek beragama yang telah diindoktrinasi supaya lebih mampu menemukan dirinya yang otentik. Subjek beragama yang otentik adalah manusia yang diarahkan untuk menemukan makna terdalam hidup dan mampu mempertanggungjawabkan keberadaan dirinya sebagai manusia yang sungguh hidup di dunia. Selain itu, subjek beragama yang otentik juga adalah manusia yang mampu memandang dirinya secara utuh. Realitas hidup yang kompleks di sekitarnya, terutama menyangkut keberagaman agama tidak menjadi halangan bagi subjek beragama yang otentik untuk melakukan pengenalan yang utuh menyangkut semua hal.

Subjek beragama yang otentik ini menjadi sumbangan besar bagi dialog Interreligius di Indonesia. Ketika dialog Interreligius menemukan tantangan melalui indoktrinasi, konsep *Otentisitas* Heidegger menawarkan alternatif agar subjek beragama di Indonesia keluar dari dirinya dan mengambil tempat untuk menunjukkan keberadaan sebagai masyarakat Indonesia yang peduli terhadap situasi keanekaragaman. Bagi subjek beragama yang memahami secara komprehensif tentang keberagaman, perbedaan bukan menjadi halangan untuk menciptakan kehidupan bersama yang kondusif di Indonesia. Satu-satunya pegangan bagi subjek beragama yang otentik adalah berkontribusi bagi pluralitas keyakinan. Pluralitas tidak kontradiktif terhadap eksistensi hidup bersama, tetapi mendukung eksistensi itu.

Subjek beragama yang otentik tidak terkungkung oleh dominasi dari kelompok atau aliran ekstrem yang menginginkan perubahan dalam sistem kehidupan bersama di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa gerakan Indoktrinasi yang masuk dengan cara membentuk dan memanipulasi cara berpikir dan bertindak untuk berafiliasi dengan doktrin tertentu tidak diterima oleh subjek beragama yang otentik. Alasan mendasarnya adalah karena subjek beragama yang otentik adalah pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu, subjek beragama yang otentik juga memiliki kualitas untuk dapat memverifikasi segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, sehingga apa pun yang bertentangan dengan pandangannya tidak sampai mendominasi tingkah lakunya. Manusia yang otentik, sebagaimana dikatakan Heidegger memiliki independensi yang mutlak atas dirinya sendiri.

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memasukkan konsep *otentisitas* Heidegger ke dalam dialog Interreligius di Indonesia. Langkah awal yang bisa diterapkan adalah setiap agama di Indonesia perlu mengkritisi metode pendidikan ajaran-ajaran agama masing-masing, mengingat bahwa persoalan yang muncul dewasa ini justru terletak pada metode penanaman ajaran-ajaran agama. Kotbah, dakwah, dan ceramah yang diberikan dalam setiap agama kadang hanya merupakan formalitas semata, tidak mencapai titik aksentuasinya melalui praktik. Seringkali ajaran agama berhenti pada tempat di mana ajaran itu diberikan atau secara ironis digiring ke dalam penerapan yang keliru akibat kesalahan penafsiran. Kejanggalan ini menjadi sebuah perhatian bersama karena mengakibatkan ajaran-ajaran agama tidak mengakar kuat ke dalam praksis kehidupan bersama, padahal ajaran-ajaran agama di Indonesia selalu mengedepankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keharmonisan hidup.

Konsep *otentisitas* Heidegger sesungguhnya berkaitan dengan cara setiap agama mendidik pemeluknya. Artinya, konsep *otentisitas* ini memberikan acuan bagi agama untuk mengembangkan metode mendidik subjek beragama yang fokus pada pengertian akan makna kehidupan (Chandra, 2021). Kehidupan dimaknai bukan saja dari landasan tekstual kitab suci dan doktrin agama, tetapi lebih kepada internalisasi keduanya dalam praksis keberadaan di dunia. Dalam kaitannya dengan itu, setiap subjek beragama mesti

melihat makna kehidupan sebagai proses pemaknaan nilai-nilai agama dalam pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam jalur dialog dengan agama lain, sebuah agama mesti memprioritaskan tumbuhnya semangat keterbukaan dan kesetaraan.

Lebih lanjut, konsep *otentisitas* Heidegger menjadi referensi bagi setiap agama untuk masuk ke dalam dirinya. Dialog Interreligius adalah dialog yang mesti mengevaluasi apa yang terjadi di dalam agama-agama di Indonesia dan berusaha berproses menjadi institusi yang mengakomodasi kebaikan bersama. Relasi antara agama yang masih kendor perlu diperhatikan lagi, secara khusus membaca kemungkinan terjadinya indoktrinasi oleh kelompok atau aliran radikal yang mengatasnamakan agama tertentu di Indonesia. Kelompok radikal pandai membaca kelemahan agama-agama, lalu masuk membawa doktrin yang barangkali ingin menggantikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Konsep *otentisitas* Heidegger menegaskan kedudukan subjek beragama yang dialogal. Gagasan ini dapat dipahami sebagai upaya personal setiap subjek beragama dalam menerapkan unsur penghormatan, kesetaraan, dan persamaan rasa sepenanggungan dengan subjek beragama lain (Riyanto, 2018). Dengan menanamkan sikap-sikap tersebut setiap subjek pertama tidak akan menjadikan dialog Interreligius sebagai bagian pembicaraan yang riskan terhadap keanekaragaman, tetapi menjadi dialog yang mewarnai keseharian. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan agar dialog-dialog yang membahas tentang isu keyakinan menjadi lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Tentu perubahan positif dalam dialog Interreligius akan bisa dicapai seandainya kesadaran akan penghormatan, kesetaraan, dan persamaan rasa sepenanggungan dengan subjek beragama lain dimulai dari bawah.

Pembentukan dan pembinaan subjek beragama yang otentik di Indonesia dapat dimulai dari lingkungan pendidikan berbasis agama seperti pesantren atau seminari. Di pesantren, nilai dan ajaran islam mesti sungguh dilihat sebagai sarana yang mendidik subjek beragama menjadi manusia yang otentik. Keotentikan subjek beragama di lingkungan pesantren bertujuan untuk mencapai pembentukan dan pembinaan santri yang mampu memegang tradisi hidup religius islam sebagai pedoman bertingkah laku dalam keseharian. Subjek beragama yang dibina di pesantren diharapkan menjadi manusia otentik yang dalam bahasa Heidegger disebut sebagai manusia yang tidak mudah dipengaruhi oleh nilai dan ajaran dari luar yang konfrontatif terhadap nilai dan ajaran dari pesantren.

Subjek beragama yang diinginkan muncul dari lingkungan seminari juga dibina untuk menyadari keotentikan diri. Para seminaris mengalami pembentukan diri bukan hanya terbatas pada kebutuhan Gereja, tetapi perlu menjawab tantangan bangsa dewasa ini. Halnya menjadi penting sebab aturan hidup berdasarkan dimensi kerohanian di seminari diupayakan untuk membentuk karakter subjek beragama yang berwawasan kebangsaan. Subjek beragama yang lahir dari lingkungan seminari diharapkan bisa menjadi manifestasi keselarasan ajaran agama dalam realitas kehidupan bersama yang lebih baik, di mana kualitas rohani yang diajarkan di seminari bisa menjadi mekanisme pengungkapan diri manusia yang otentik itu sendiri.

Dua lingkungan pendidikan berbasis agama tersebut menjadi contoh bagaimana subjek beragama yang otentik mulai dibentuk dan dibina di Indonesia. Inilah relevansi konsep *otentisitas* Heidegger yang masuk dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Harapannya adalah subjek beragama yang lahir dari lingkungan pendidikan berbasis ajaran religius apapun di Indonesia muncul sebagai manusia yang mengambil peran dalam dialog interreligius. Dengan partisipasi aktifnya, subjek beragama yang didik dalam lingkungan pendidikan berbasis ajaran agama bisa menjadi inisiator dialog yang dialogis di Indonesia.

Masyarakat kelas bawah yang rentan terhadap pengaruh indoktrinasi juga menjadi sasaran konsep *Otentisitas* Martin Heidegger dalam praksis dialog interreligius di Indonesia. Alternatif yang bisa diterapkan adalah dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjadi diri sendiri dalam pengalaman kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat yang sekaligus juga subjek beragama harus mengikuti norma-norma sosial, hukum, dan agama yang berlaku di negara Indonesia. Setiap individu perlu belajar untuk merenungkan eksistensialitas masing-masing dan mengaitkannya dengan agama yang dianut.

Masyarakat kelas bawah harus didorong untuk mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri sebagai individu yang unik dan memahami nilai-nilai dan keyakinan agama mereka dengan cara yang mendalam dan pribadi. Nilai-nilai yang melekat di dalam filsafat keindonesiaan seperti gotong royong, musyawarah mufakat, sopan santun, religiusitas dan kekeluargaan mesti menjadi tata nilai yang berlaku dalam praktik hidup keagamaan setiap pribadi dalam masyarakat. Masyarakat kelas bawah dapat didorong untuk membangun komunitas hidup bermasyarakat yang tekun mendiskusikan, merenungkan, dan mendukung satu sama lain dalam pencarian makna hidup dan pertumbuhan spiritual, sebuah usaha yang memang menjadi kualitas subjek beragama yang otentik.

Pendidikan kesadaran melalui dakwah, khotbah, ceramah, dan secara khusus melalui program-program pemerintah adalah kunci untuk membantu masyarakat kelas bawah memahami agama mereka secara komprehensif. Pendidikan agama tidak harus berfokus pada ritual dan dogma, tetapi juga diarahkan pada pertanyaan eksistensial dan filosofis yang mendasari keyakinan agama tersebut. Melalui pendidikan kesadaran, individu dapat memperoleh alat untuk merenungkan agama mereka dengan lebih mendalam. Jadi, untuk menjadikan masyarakat kelas bawah sebagai subjek beragama yang otentik sesuai dengan pandangan Martin Heidegger, diperlukan pendekatan yang mendorong setiap individu untuk merenungkan eksistensialitas di dalam cara hidup bermasyarakat.

5. Subjek Religius yang Otentik dan Moderasi Beragama di Indonesia

Pada dasarnya moderasi beragama merupakan sebuah penegasan terhadap keutamaan yang melekat dalam setiap agama di Indonesia. Agama-agama yang ada di Indonesia selalu merefleksikan penghayatan cinta kasih, perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan sebagai nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam setiap subjek beragama. Moderasi beragama menginginkan setiap subjek beragama di Indonesia untuk menghayati ajaran agama masing-masing tidak melulu pada tataran konseptual, dogmatisme, dan ritualisme semata, tetapi pada praktik kehidupan bersama yang lebih baik antara sesama, meskipun terhadap mereka yang berbeda agama.

Ide *Otentisitas* yang dipromosikan oleh Martin Heidegger bersentuhan langsung dengan proyek moderasi beragama di Indonesia. Halnya terletak pada sumbangan konsep *otentisitas* dalam membentuk dan membina subjek beragama yang otentik bagi moderasi beragama. Melalui konsep ini moderasi beragama didorong untuk lebih menjangkau ke bawah, yakni ke lapisan masyarakat akar rumput yang potensial terhadap isu radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi bangsa. Subjek beragama yang otentik mendukung proyek moderasi beragama, sebab subjek beragama yang otentik suportif dan kontributif terhadap internalisasi cara beragama di Indonesia.

Internalisasi cara hidup moderasi beragama mendukung sikap menghormati harkat dan martabat sesama manusia (Sudiarta, 2020). Persis cara hidup seperti inilah yang ingin dicapai oleh setiap subjek beragama yang otentik itu, yang pada satu sisi memiliki penghormatan terhadap manusia lain tetapi tetap mengutamakan keaslian dirinya sebagai makhluk yang otonom. Otonomi diri seperti yang dimaksudkan oleh Heidegger sangat

penting bagi setiap subjek religius di Indonesia dalam rangka penguatan ajaran setiap agama yang dianut dan pelestarian nilai-nilai filsafat keindonesiaan yang sudah melekat sejak lahir (Nirasma, 2021). Jadinya karakter manusia yang otentik ini menjadi pengejawantahan prinsip-prinsip umum yang diterima setiap dalam agama dan masyarakat.

Aspek lain yang bisa diulas dari kualitas manusia yang otentik menurut Heidegger adalah soal kemampuannya membuka dialog yang dialogis. Hal ini tentu saja merupakan sebuah poin penting bagi moderasi beragama di Indonesia apabila dilihat dari beberapa sisi. Pertama mengatasi mispersepsi dan prasangka yang sering muncul ketika orang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang keyakinan dan praktik agama yang berbeda. Kedua menghindari perbedaan pandangan yang seringkali muncul dalam forum diskusi moderasi beragama. Karena agama. Ketika subjek beragama yang otentik dapat berbicara satu sama lain dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog, mereka cenderung mencari solusi damai daripada mengambil jalur konfrontasi. Ketiga membangun hubungan yang semakin mendalam antara berbagai agama.

Kesimpulan

Sumbangan konsep *Otentisitas* Martin Heidegger merupakan konsep yang relevan dengan konteks kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Fokus utama yang ditilik oleh konsep ini bermaksud mendidik manusia untuk hidup dalam otonomi diri yang unik dan bebas dari determinasi pihak lain. Konsep ini menjadi penting dalam membentuk subjek beragama yang otentik di Indonesia, yakni subjek beragama yang mengedepankan semangat ajaran yang baik dari setiap agama dalam kontribusinya terhadap kehidupan berbangsa tanpa dipengaruhi oleh aliran yang radikal dan ekstremis. Pada saat yang bersamaan konsep *Otentisitas* ini juga mendukung praksis moderasi beragama di Indonesia. Subjek beragama yang otentik memiliki kualitas diri yang mendukung tegaknya moderasi beragama yang mengutamakan bertumbuhnya semangat toleransi di Indonesia. Dalam tataran dialog interreligius yang dibangun dalam moderasi beragama, konsep ini juga menyumbangkan subjek beragama Indonesia yang menciptakan dialog yang konstruktif di Indonesia. Peran ini penting dan mendesak, sebab dialog yang baik mesti berangkat dari pribadi-pribadi yang sungguh paham akan realitas keberagaman dan mencoba menyatukan semangat keberagaman itu. Pada akhirnya setiap agama di Indonesia diajak untuk membentuk dan mendidik manusia yang otentik. Ajaran kitab suci, tradisi, maupun dogma yang melekat dalam setiap agama adalah landasan yang sungguh murni dalam membentuk dan mendidik subjek beragama yang otentik. Kesadaran setiap subjek beragama diri secara lebih mendalam melalui ajaran masing-masing agama dinilai berkontribusi terhadap agama dan negara ini. Agama membantu negara untuk mencegah bibit radikalisme, juga semakin menumbuhkan nilai-nilai fundamental yang dihayati setiap orang di negara Indonesia ini.

Daftar Pustaka

- Afadal. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Alrafi, F., & James, F. M. (2017). Analisis Filosofis Otentisitas Dasein dalam Kajian Eksistensialisme Martin Heidegger. *The Proceeding of the 2 International Young Scholars Symposium of Humanities and Arts, INUSHARTS*, 62.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam* 9.2, 15.
- Azis, N. (2013). Manusia Sebagai Subjek dan Objek dalam Filsafat Eksistensialism Martin Heidegger (Kajian dari Segi Karakteristik dan Pola Pikir yang Dikembangkan). *Substansia*, 15 (2), 263.

- Desmaliza. (2012). Indoktrinasi di Sekolah Islam: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Islamika*, Volume 2, No 1, 150-151.
- Chandra, H. (2021). Makna Hidup Menurut Filsafat Martin Heidegger dalam Terang Karl Rahner. *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 36.
- Faozan, A. (2022). *Wacana Intoleransi dan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Halim, A. (2015). Pluralisme dan Dialog Antar Agama." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol 14.1, 36.
- Hardiman, F. B. (2003). *Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zei.*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Juergensmeyer, M. (2002). *Teror atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*. Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing.
- Kamal, A. (2019). Spiritual-Humanisme Hasan Askari Dan Dialog Interreligi di Indonesia. *Studia Sosia Religia* Vol. 2 No. 2, 54.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kristiatmo, T. (2017). Mengalami Dimensi Poetik Agama: Sumbangan Kreatif Heidegger Terhadap Agama. *Melintas* 33 (3), 310.
- Martaufiq, S., & Fachruddin, A. H. (2019). Esensi Pendidikan Ontologis Heidegger bagi Pendidikan Tinggi. *Akademika* Vol 13 (2), 254.
- Musyafak, N., dan Lulu C. N. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai dalam Konflik Agama*. Semarang: Penerbit Lawwana.
- Munif, M. Dkk. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 6.2, 422-423.
- Nirasma, M. (2021). Aku Lawan Semua: Autentisitas dan Percabangannya dalam Sejarah Filsafat Barat. *Human Narratives* vol. 2, no.2, 130.
- Riyanto, A. (2010). *Dialog Interreligi: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Riyanto, A. (2010). Sebuah Studi Tentang Dialog Interreligi. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 9.2, 252.
- Riyanto, A. (2011) *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Riyanto, A. (2017). Berfilsafat "Being And Time" Martin Heidegger: Catatan Sketsa. *Studia Philosophica et Theologica* 17.1, 19.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suharto, B. (2021). *Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Tan, P. (2023). Krisis Metafisika dan Filsafat Sebagai Tugas Berpikir: Perspektif Heidegger. *Lumen Veritatis*, Boleh 14 no 2, 106.
- Tjahjadi, S. (2016). Manusia dan Historisitasnya Menurut Martin Heidegger. *Jurnal Filsafat*, 51.
- Sudiartha, K. "Merajut Nilai-Nilai Kemanusiaan Melalui Moderasi Beragama." *Prosiding STHD Klaten Jawa Tengah* 1, no.1, 2020.
- Syam, N. (2008). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia dari Radikalisme menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tanzil, V. (2012). Dari Akar Menuju Matahari: Dialog Interreligi Akar Rumput Dalam Konteks Kemajemukan Konflik Di Indonesia. *Academia*, 2012.
- Wrathall, M. (2006). *How to Read Heidegger*. (New York & London: W. W. Norton & Company).